AL-DYAS
Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat

p-ISSN : 2964-4992
e-ISSN : 2964-4984

Terindeks : Dimensions, Scilit, Lens, Crossref, Semantic, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/aldyas.v5i3.12229

Kesadaran Perempuan Kota Solok terhadap Fenomena Kekerasan dalam Rumah Tangga

Awareness among Women in Solok City of the Phenomenon of Domestic Violence

Nisa Qori Al Afif & Siska Sasmita
Universitas Negeri Padang
nisaqorialafif1@gmail.com

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Aug 19, 2026	Sep 3, 2026	Sep 29, 2026	Oct 4, 2026

Abstract

Domestic violence (KDRT) remains a problem affecting women, while awareness of how to recognize, understand, and respond to it has not yet fully developed. In Solok City, the view that domestic violence is a private matter also influences women's courage to report violence and seek protection. This study aims to describe women's awareness of the phenomenon of domestic violence in Solok City. The study employed a qualitative descriptive approach involving 46 purposively selected informants, comprising 38 married women, 2 informants from Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) in Solok City, and 6 members of the Solok City community. Data were collected through semistructured interviews and documentation, and then analyzed through the stages of data collection, reduction, and display, as well as conclusion drawing and verification. The analysis used the Social Identity Model of Collective Action (SIMCA) framework, encompassing social identity, perceived injustice, and group efficacy. The results showed that women's awareness of domestic violence was beginning to develop, particularly in recognizing physical violence, verbal violence, and economic neglect and understanding the existence of reporting and protection services. However, this awareness remained insufficiently developed because domestic violence still tended to be understood as a personal matter and some forms of violence continued to be normalized. Trust in institutions, economic dependence, concerns about the consequences of reporting, and limited social support also influenced women's courage in responding to domestic violence. These findings clarify the gap between recognizing violence and having the courage to respond to it, and indicate the relationship between women's awareness and social, economic, and institutional conditions in the context of domestic violence in Solok City.

Al-DYAS is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Keywords: Women's Awareness; Domestic Violence; Social Identity; Perceived Injustice; Group Efficacy

Abstrak: Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi persoalan yang berdampak terhadap perempuan, sementara kesadaran untuk mengenali, memahami, dan meresponsnya belum terbentuk secara optimal. Di Kota Solok, pandangan bahwa KDRT merupakan persoalan privat turut memengaruhi keberanian perempuan untuk melaporkan kekerasan dan mencari perlindungan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kesadaran perempuan di Kota Solok terhadap fenomena KDRT. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan 46 informan yang dipilih secara purposif, terdiri atas 38 perempuan menikah, 2 informan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Solok, serta 6 anggota masyarakat Kota Solok. Data dikumpulkan melalui wawancara semiterstruktur dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahap pengumpulan, reduksi, dan penyajian data serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Analisis menggunakan kerangka *Social Identity Model of Collective Action* (SIMCA) yang mencakup identitas sosial, persepsi ketidakadilan, dan efikasi kelompok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran perempuan terhadap KDRT mulai berkembang, terutama dalam mengenali kekerasan fisik, verbal, dan penelantaran ekonomi serta memahami keberadaan layanan pelaporan dan perlindungan. Namun, kesadaran tersebut belum optimal karena KDRT masih cenderung dipahami sebagai persoalan pribadi dan beberapa bentuk kekerasan masih dinormalisasi. Kepercayaan terhadap lembaga, ketergantungan ekonomi, kekhawatiran terhadap konsekuensi pelaporan, dan keterbatasan dukungan sosial turut memengaruhi keberanian perempuan dalam merespons KDRT. Temuan ini memperjelas kesenjangan antara pengenalan terhadap kekerasan dan keberanian untuk meresponsnya, serta menunjukkan keterkaitan kesadaran perempuan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan kelembagaan dalam konteks KDRT di Kota Solok.

Kata Kunci: Kesadaran Perempuan; Kekerasan dalam Rumah Tangga; Identitas Sosial; Persepsi Ketidakadilan; Efikasi Kelompok

PENDAHULUAN

Kesadaran merupakan kondisi ketika seseorang mampu memahami, mengenali, dan memaknai sesuatu yang terjadi pada dirinya maupun lingkungan sosialnya. Kesadaran tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan terhadap suatu keadaan, tetapi juga mencakup kemampuan memahami hak, tanggung jawab, serta kondisi yang dialami dalam kehidupan bermasyarakat (Septirahmah & Hilmawan, 2021; 'Ilmiyyati & Nur'aeni, 2023). Dalam konteks persoalan sosial, kesadaran menjadi penting karena pemahaman terhadap suatu masalah dapat memengaruhi cara individu menentukan sikap dan tindakan. Kesadaran juga dapat berkembang menjadi kesadaran bersama ketika individu melihat bahwa suatu persoalan tidak hanya dialami secara personal, tetapi memiliki keterkaitan dengan anggota kelompok lainnya (Overstreet & Quinn, 2013). Dengan demikian, kesadaran perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak cukup dipahami sebatas kemampuan menyebutkan

bentuk-bentuk kekerasan, tetapi juga mencakup kemampuan mengenali pengalaman kekerasan, memahami ketidakadilan yang terjadi, serta mengetahui dukungan dan tindakan yang dapat dilakukan ketika kekerasan terjadi.

Konteks tersebut menjadi penting ketika dikaitkan dengan perempuan di Kota Solok yang berada dalam lingkungan sosial dan budaya Minangkabau. Data BPS Kota Solok yang digunakan dalam penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan mencapai 39.405 jiwa, dengan mayoritas masyarakat berasal dari suku Minangkabau. Dalam adat Minangkabau, perempuan memiliki kedudukan penting dalam struktur keluarga dan masyarakat, termasuk melalui konsep *Bundo Kanduang*. Menurut (Irawaty & Darojat, 2019) menjelaskan bahwa perempuan Minangkabau memiliki posisi dan peran penting dalam keluarga, pengasuhan, pewarisan, serta kehidupan sosial masyarakat. Namun, posisi kultural tersebut tidak secara otomatis menghilangkan ketimpangan dalam kehidupan domestik. Begitupula (Afifah, 2024) menunjukkan bahwa dalam konteks budaya matrilineal Minangkabau masih ditemukan stereotip gender, dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan rumah tangga, pembagian peran domestik yang tidak seimbang, serta bentuk-bentuk ketidakadilan terhadap perempuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan nilai matrilineal dan kedudukan simbolik perempuan perlu dilihat bersamaan dengan realitas relasi kekuasaan dalam kehidupan rumah tangga.

KDRT merupakan persoalan yang secara langsung berkaitan dengan keamanan, martabat, dan kehidupan perempuan dalam keluarga. KDRT dapat berbentuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga dan dalam banyak kasus perempuan menjadi kelompok yang rentan mengalaminya (Santoso, 2019; Hatu et al., 2024). Kondisi tersebut juga terlihat di Kota Solok. Berdasarkan arsip Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Solok, selama 2018–2025 tercatat 44 kasus KDRT, yang terdiri atas 38 kasus kekerasan fisik, 1 kasus kekerasan verbal, dan 5 kasus penelantaran. Jumlah kasus mengalami perubahan setiap tahun, dengan kasus tertinggi tercatat pada 2024 sebanyak 14 kasus dan terendah pada 2018 serta 2021 masing-masing sebanyak 1 kasus. Data tersebut memberikan gambaran mengenai kasus yang tercatat secara resmi, tetapi belum dapat dipandang sebagai gambaran keseluruhan pengalaman KDRT karena tidak semua tindakan kekerasan dilaporkan atau dikenali sebagai KDRT.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa persoalan KDRT tidak hanya terletak pada terjadinya tindakan kekerasan, tetapi juga pada kemampuan perempuan untuk mengenali,

memaknai, dan merespons tindakan tersebut. Hasil pengamatan awal dalam penelitian menunjukkan bahwa kekerasan nonfisik lebih sulit dikenali karena tidak selalu meninggalkan bekas yang terlihat dan dapat dianggap sebagai pertengkaran biasa dalam rumah tangga. Kekerasan verbal dan penelantaran ekonomi juga relatif lebih mudah dinormalisasi atau dibenarkan berdasarkan alasan tertentu, sementara pandangan bahwa KDRT merupakan urusan pribadi keluarga dapat membatasi keberanian untuk melibatkan pihak lain. Temuan tersebut sejalan dengan kajian mengenai stigma dan hambatan pencarian bantuan pada kekerasan pasangan intim yang menunjukkan bahwa stigma dapat menjadi salah satu hambatan bagi korban untuk mencari bantuan. Penelitian (Evans & Feder, 2016; Setiawan, 2020) juga menunjukkan bahwa perempuan penyintas KDRT dapat menempuh jalur dukungan formal maupun informal, sementara proses pengungkapan pengalaman kekerasan dipengaruhi oleh berbagai hambatan dan faktor pendukung. Oleh karena itu, kesadaran terhadap KDRT perlu dipahami lebih luas daripada sekadar pengetahuan mengenai jenis kekerasan, yaitu mencakup keberanian mengenali ketidakadilan, membangun dukungan sosial, dan melihat adanya kemampuan bersama untuk menghadapi persoalan tersebut.

Untuk memahami proses tersebut, penelitian ini menggunakan *Social Identity Model of Collective Action* (SIMCA). Model yang dikembangkan (Van Zomeren et al., 2008) menempatkan identitas sosial, persepsi ketidakadilan, dan efikasi kelompok sebagai unsur penting dalam menjelaskan kecenderungan individu untuk melakukan tindakan kolektif. Ketiga aspek tersebut relevan untuk melihat kesadaran perempuan terhadap KDRT karena perempuan tidak hanya perlu memahami kekerasan sebagai pengalaman individual, tetapi juga dapat melihatnya sebagai persoalan yang dialami kelompok perempuan, menilai tindakan tersebut sebagai bentuk ketidakadilan, serta memiliki keyakinan bahwa dukungan dan tindakan bersama dapat memberikan perubahan. Penerapan SIMCA dalam konteks Indonesia juga telah menunjukkan bahwa identitas sosial berkaitan dengan persepsi ketidakadilan dan efikasi kolektif dalam menjelaskan kecenderungan terhadap tindakan berbasis kelompok. Penelitian lain mengenai solidaritas kelompok juga menunjukkan pentingnya kesadaran kolektif, rasa saling percaya, kebersamaan, dan kerja sama dalam mendukung aktivitas kelompok. Berdasarkan kondisi tersebut, masih terdapat ruang penelitian untuk memahami bagaimana perempuan di tingkat masyarakat lokal mengenali KDRT, memandangnya sebagai ketidakadilan, dan menilai kemampuan dirinya maupun lingkungan sosial untuk memberikan respons. Tujuan ppenelitian ini berfokus pada analisis kesadaran perempuan Kota Solok

terhadap fenomena KDRT dengan menggunakan perspektif SIMCA yang meliputi identitas sosial, persepsi ketidakadilan, dan efikasi kelompok.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan desain deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan kondisi alamiah di lapangan, dengan menekankan makna, pengalaman, dan pandangan informan terhadap fenomena yang diteliti (Moleong, 2021). Desain deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan kondisi yang ditemukan di lapangan secara sistematis tanpa melakukan manipulasi terhadap fenomena penelitian (Hairani, 2023). Penelitian dilaksanakan di Kota Solok pada 2 Mei sampai 30 Juni 2026. Fokus penelitian diarahkan pada kesadaran perempuan terhadap fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), khususnya bagaimana perempuan mengenali bentuk-bentuk KDRT, memaknai tindakan kekerasan, memahami ketidakadilan yang dialami, serta merespons dan memanfaatkan dukungan sosial maupun layanan perlindungan yang tersedia.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi yang berkaitan dengan kondisi KDRT dan upaya perlindungan perempuan di Kota Solok. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan dan karakteristik tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian (Ksanjaya & Rahayu, 2022). Informan penelitian terdiri atas 46 orang, yaitu 38 perempuan yang telah menikah, baik yang pernah maupun tidak pernah mengalami KDRT, 2 informan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Solok, serta 6 masyarakat Kota Solok yang memiliki informasi relevan dengan fenomena penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pemahaman informan mengenai bentuk KDRT, pengalaman atau pengetahuan mengenai kekerasan, pandangan terhadap ketidakadilan, faktor yang memengaruhi keberanian melapor, serta dukungan masyarakat dan lembaga perlindungan. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data wawancara, terutama berupa arsip atau dokumen yang berkaitan dengan kasus KDRT dan pelayanan perlindungan perempuan di Kota Solok.

Peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian karena peneliti terlibat secara langsung dalam proses pengumpulan, pemaknaan, dan analisis data. Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dianalisis secara kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan menggunakan teori dari (Miles et al., 2022). Pada tahap reduksi, data diseleksi, dikelompokkan, dan difokuskan berdasarkan tema penelitian, yaitu identitas sosial, persepsi ketidakadilan, dan efikasi kelompok sebagai tiga aspek dalam *Social Identity Model of Collective Action* (SIMCA). Data yang telah direduksi kemudian disajikan secara deskriptif dalam bentuk uraian dan pengelompokan temuan agar hubungan antarinformasi dapat terlihat secara jelas. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan pola dan temuan yang muncul dari data, kemudian melakukan verifikasi melalui peninjauan kembali terhadap data hasil wawancara dan dokumentasi untuk memastikan kesesuaian antara kesimpulan dan kondisi yang ditemukan di lapangan. Tahapan analisis tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai kesadaran perempuan Kota Solok dalam mengenali, memaknai, dan merespons fenomena KDRT.

HASIL

1. Pemahaman Perempuan Mengenai Bentuk KDRT

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perempuan mengenai bentuk KDRT belum sepenuhnya seragam. Kekerasan fisik relatif lebih mudah dikenali sebagai KDRT, sedangkan kekerasan verbal dan penelantaran ekonomi masih memiliki batas pemahaman yang berbeda di antara informan. Beberapa informan masih memberikan toleransi terhadap perkataan kasar, bentakan, penghinaan, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi apabila tindakan tersebut dianggap memiliki alasan tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengenalan terhadap KDRT masih dipengaruhi oleh cara perempuan memaknai perilaku yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga.

Pada kekerasan verbal, misalnya, terdapat informan yang tidak menganggap perkataan kasar atau tindakan merendahkan sebagai KDRT apabila disampaikan dalam konteks bercanda. Ibu R menyampaikan, *"... tidak, memang ada omongan kasar pas nonton, meremehkan tapi bercanda. Tapi ga pernah KDRT kok ..."* Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa konteks bercanda dapat menjadi alasan suatu perkataan kasar tidak dikenali sebagai kekerasan. Selain itu, terdapat pula pandangan bahwa bentakan atau tindakan kasar merupakan bagian dari relasi

suami-istri. Hal tersebut terlihat dari pernyataan Bapak M yang memandang bahwa suami dapat memberikan teguran keras kepada istri ketika dianggap tidak mengikuti perkataan suami.

Pemahaman terhadap penelantaran ekonomi juga menunjukkan kondisi yang serupa. Seluruh informan memahami bahwa nafkah merupakan kewajiban dalam rumah tangga, tetapi tidak semua mengategorikan tidak terpenuhinya nafkah sebagai KDRT. Ibu E menyatakan bahwa nafkah terkadang diberikan dan terkadang tidak, tetapi ia memilih memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak menganggap kondisi tersebut sebagai KDRT selama tidak terjadi kekerasan fisik. Hal yang sama disampaikan Ibu W yang menganggap tidak adanya nafkah bukan persoalan utama selama suami tidak melakukan kekerasan fisik. Di sisi lain, Ibu F telah memahami bahwa KDRT memiliki berbagai bentuk dan tidak hanya berupa kekerasan fisik. Dengan demikian, kekerasan fisik merupakan bentuk yang paling mudah dikenali, sedangkan kekerasan verbal dan penelantaran ekonomi masih dapat dianggap sebagai hal yang biasa atau dapat ditoleransi dalam kondisi tertentu.

2. Kesadaran terhadap Ketidakadilan dalam Relasi Rumah Tangga

Kesadaran perempuan terhadap ketidakadilan dalam relasi rumah tangga menunjukkan bahwa sebagian informan telah mampu mengenali perlakuan yang merugikan, tetapi penilaian terhadap tindakan tersebut belum seragam. Bentakan, perkataan yang merendahkan, tidak adanya dukungan ekonomi, dan perlakuan kasar dapat dipahami sebagai pengalaman yang tidak menyenangkan. Namun, dalam situasi tertentu tindakan tersebut masih dianggap wajar apabila terdapat alasan yang menurut informan dapat diterima. Dengan demikian, kesadaran terhadap perlakuan yang merugikan belum selalu berkembang menjadi pemahaman bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk ketidakadilan dalam hubungan rumah tangga.

Perbedaan pemaknaan juga terlihat dalam hubungan antara posisi suami sebagai kepala keluarga dan tindakan yang dilakukan terhadap istri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suami masih dipandang memiliki kewenangan lebih besar dalam rumah tangga. Pandangan tersebut menyebabkan tindakan seperti membentak, memarahi, atau memberikan teguran keras dalam kondisi tertentu dapat dipahami sebagai bagian dari kewenangan atau teguran terhadap istri, bukan sebagai tindakan kekerasan. Pada sisi lain, terdapat perempuan yang menyadari bahwa dirinya berada dalam posisi yang dirugikan, tetapi kesadaran tersebut belum selalu diikuti dengan tindakan untuk mengubah keadaan. Pertimbangan terhadap hubungan suami-istri, kebutuhan anak, kondisi keluarga, dan keadaan ekonomi turut memengaruhi keputusan perempuan.

Respons terhadap perlakuan yang dianggap merugikan juga menunjukkan adanya perbedaan. Ibu G memilih diam ketika suaminya membentak dan memaki saat dimintai nafkah dengan alasan bahwa diam dianggap dapat menghindari kesalahan atau pertengkaran yang lebih besar. Sebaliknya, Ibu R menunjukkan respons yang lebih terbuka dengan melawan dan mempertimbangkan pelaporan kepada keluarga suami. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran mengenai adanya perlakuan yang merugikan telah muncul pada sebagian perempuan, tetapi batas antara tindakan yang dianggap wajar dan tindakan yang dianggap sebagai kekerasan masih berbeda-beda.

3. KDRT sebagai Persoalan Privat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KDRT di lingkungan masyarakat Kota Solok masih sering dipandang sebagai persoalan pribadi dalam rumah tangga. Pandangan tersebut terlihat dari anggapan bahwa permasalahan antara suami dan istri sebaiknya diselesaikan oleh pasangan yang bersangkutan tanpa melibatkan pihak luar. Ketika mengetahui adanya persoalan dalam rumah tangga orang lain, sebagian informan cenderung mempertimbangkan kemungkinan bahwa peristiwa tersebut merupakan kesalahpahaman antara pasangan. Ibu A, misalnya, menyampaikan bahwa seseorang tidak dapat langsung menyalahkan suami karena perempuan juga dapat dianggap memiliki peran dalam terjadinya pertengkaran.

Pandangan mengenai KDRT sebagai persoalan privat juga memengaruhi cara perempuan korban merespons kekerasan. Sebagian perempuan lebih dahulu diarahkan untuk menyelesaikan persoalan secara individual atau melalui lingkungan keluarga. Bentuk respons yang ditemukan meliputi diam, menunggu keadaan membaik, menahan perlakuan yang diterima, dan berusaha menyelesaikan persoalan dalam lingkungan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan pihak luar belum selalu menjadi pilihan pertama ketika KDRT terjadi.

Meskipun demikian, penelitian juga menemukan adanya kepedulian masyarakat terhadap perempuan yang mengalami KDRT. Sebagian warga memberikan saran kepada korban untuk melapor apabila kekerasan kembali terjadi, sedangkan warga lainnya berupaya membantu memisahkan korban dan pelaku. Bapak Y menyampaikan bahwa ia memberikan saran kepada kedua pihak dan mendorong korban untuk melapor jika kejadian kembali terjadi. Sementara itu, Ibu A menyatakan bahwa dirinya membantu memisahkan korban dan pelaku. Temuan ini menunjukkan bahwa respons masyarakat tidak sepenuhnya seragam; masih

terdapat pandangan yang menempatkan KDRT sebagai urusan keluarga, tetapi telah muncul pula tindakan sosial untuk memberikan bantuan kepada korban.

4. Faktor Ekonomi dan Ketergantungan dalam Merespons KDRT

Kondisi ekonomi menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan perempuan ketika memahami dan merespons KDRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya nafkah tidak selalu langsung dipandang sebagai KDRT apabila perempuan masih mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga melalui usaha sendiri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemaknaan terhadap penelantaran ekonomi berkaitan dengan kemampuan perempuan dalam memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Dengan kata lain, kondisi ekonomi tidak hanya menjadi bagian dari pengalaman rumah tangga, tetapi juga memengaruhi cara perempuan menentukan apakah suatu perlakuan termasuk persoalan biasa atau bentuk kekerasan.

Pertimbangan ekonomi juga muncul ketika perempuan menentukan tindakan terhadap kekerasan yang dialami. Sebagian perempuan memiliki ketergantungan ekonomi terhadap suami sehingga keputusan untuk melawan atau meninggalkan rumah tangga tidak hanya mempertimbangkan pengalaman kekerasan, tetapi juga kebutuhan hidup dan keberlangsungan keluarga. Pernyataan Ibu E mengenai nafkah menunjukkan bahwa ketika nafkah tidak diberikan, ia memilih memenuhi kebutuhan secara mandiri dan tidak menganggap kondisi tersebut sebagai KDRT selama tidak terjadi kekerasan fisik.

Selain itu, kondisi ekonomi dapat berhubungan dengan pilihan perempuan untuk menghindari konflik. Ketika mengalami bentakan atau perlakuan kasar, terdapat perempuan yang memilih diam agar pertengkaran tidak semakin besar. Ibu G menyatakan bahwa dirinya lebih memilih diam daripada banyak berbicara karena khawatir perkataannya justru menimbulkan masalah. Dengan demikian, faktor ekonomi dan ketergantungan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan rumah tangga, tetapi juga menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan keberanian perempuan untuk mengambil tindakan terhadap KDRT.

5. Kemampuan untuk Bertindak

Kemampuan perempuan untuk bertindak dalam menghadapi KDRT menunjukkan pola respons yang beragam. Sebagian perempuan memilih diam dan menunggu keadaan menjadi lebih tenang, sedangkan sebagian lainnya memilih melawan, meminta bantuan keluarga, memberikan saran kepada korban, atau mendorong korban untuk melaporkan

kekerasan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap KDRT belum selalu menghasilkan bentuk tindakan yang sama. Pilihan tindakan dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, kondisi keluarga, hubungan dengan pasangan, serta dukungan yang tersedia di lingkungan sekitar.

Pada tingkat individu, terdapat perempuan yang memilih menghadapi situasi secara mandiri. Diam menjadi salah satu bentuk respons untuk menghindari pertengkaran yang lebih besar, sedangkan perempuan lainnya memilih melakukan perlawanan dan melibatkan keluarga. Ibu R, misalnya, menyatakan bahwa dirinya memilih melawan dan melaporkan persoalan kepada keluarga pihak suami. Pada tingkat masyarakat, ditemukan pula tindakan membantu korban. Bapak Y memberikan saran kepada korban agar melapor apabila kekerasan kembali terjadi, sedangkan Ibu A membantu memisahkan korban dan pelaku ketika mengetahui adanya KDRT.

Dukungan kelembagaan juga telah tersedia melalui DPPPA Kota Solok. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak DPPPA, bentuk dukungan yang dilakukan meliputi sosialisasi kepada masyarakat, pembentukan jejaring perlindungan, pendampingan korban, peningkatan kapasitas masyarakat, penjangkauan, serta koordinasi dengan berbagai pihak. Sosialisasi dilakukan kepada kelompok masyarakat, termasuk RT dan RW, organisasi perempuan, serta organisasi penyandang disabilitas, dengan menggunakan media seperti brosur, leaflet, banner, dan baliho. Informasi yang diberikan diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai bentuk kekerasan dan jalur pelaporan yang dapat digunakan.

Meskipun dukungan masyarakat dan kelembagaan telah tersedia, keberanian perempuan untuk memanfaatkan dukungan tersebut belum merata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan masih mempertimbangkan tingkat kepercayaan terhadap lembaga, kemungkinan hasil setelah pelaporan, serta pandangan bahwa persoalan rumah tangga sebaiknya diselesaikan secara pribadi. Dengan demikian, kemampuan perempuan dalam merespons KDRT tidak menunjukkan pola yang sama. Sebagian telah berani melawan, meminta bantuan, atau mendorong pelaporan, sedangkan sebagian lainnya masih memilih diam atau menyelesaikan persoalan dalam lingkungan keluarga. Dukungan sosial dan kelembagaan telah tersedia, tetapi pemanfaatannya masih dipengaruhi oleh pertimbangan pribadi, keluarga, ekonomi, dan kepercayaan terhadap pihak yang memberikan bantuan.

Tabel 1. Inti Temuan Kemampuan Perempuan untuk Bertindak dalam Menghadapi KDRT

Aspek	Temuan Utama
Tindakan individu	Diam, melawan, atau menghadapi persoalan secara mandiri
Dukungan keluarga/masyarakat	Meminta bantuan keluarga, memberi saran kepada korban, dan memisahkan korban dari pelaku
Dukungan kelembagaan	Sosialisasi, pendampingan, penjangkauan, jejaring perlindungan, dan koordinasi oleh DPPPA Kota Solok
Hambatan bertindak	Kekhawatiran terhadap konflik, kepercayaan terhadap lembaga, hasil pelaporan, kondisi keluarga dan ekonomi
Kondisi umum	Kemampuan bertindak belum merata; sebagian sudah berani bertindak, sebagian masih memilih diam

Sumber: Hasil Penelitian, 2026

Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa kemampuan perempuan untuk bertindak dalam menghadapi KDRT memiliki bentuk yang beragam, mulai dari tindakan pribadi, meminta bantuan keluarga dan masyarakat, hingga memanfaatkan dukungan kelembagaan. Tindakan yang dilakukan belum seragam karena sebagian perempuan telah berani melawan atau mendorong pelaporan, sementara sebagian lainnya masih memilih diam dan menyelesaikan persoalan dalam lingkungan keluarga. Di sisi lain, keberadaan DPPPA Kota Solok telah menyediakan dukungan melalui sosialisasi, pendampingan, dan jejaring perlindungan. Namun, pemanfaatan dukungan tersebut masih dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap lembaga, kondisi keluarga dan ekonomi, serta pertimbangan mengenai konsekuensi setelah pelaporan.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Solok telah mulai terbentuk, tetapi belum berkembang secara optimal menjadi kesadaran bersama yang mendorong tindakan kolektif. Temuan tersebut terlihat dari tiga kondisi yang saling berkaitan, yaitu pemahaman mengenai bentuk KDRT yang belum seragam, persepsi terhadap ketidakadilan yang belum konsisten, dan keyakinan untuk menghadapi KDRT dengan dukungan kelompok yang masih terbatas. Kondisi tersebut dapat dipahami melalui Social Identity Model of Collective Action (SIMCA), yang menjelaskan keterkaitan antara identitas sosial, persepsi ketidakadilan, dan efikasi kelompok dalam membentuk kecenderungan untuk melakukan tindakan bersama. Dalam (Van Zomeren et al., 2008) menunjukkan bahwa ketiga aspek tersebut memiliki peran yang saling berkaitan dalam menjelaskan tindakan kolektif. Dalam konteks Indonesia, (Setiawan, 2020) juga menunjukkan

bahwa SIMCA dapat diterapkan untuk memahami bagaimana identitas kelompok, persepsi ketidakadilan, dan efikasi kolektif saling berhubungan dalam membentuk respons kelompok.

1. Identitas Sosial dalam Kesadaran Perempuan terhadap KDRT

Dalam SIMCA, identitas sosial merupakan salah satu dasar penting dalam terbentuknya kesadaran berbasis kelompok. Identitas sosial memungkinkan individu melihat dirinya sebagai bagian dari kelompok tertentu sehingga pengalaman yang dialami tidak hanya dipahami sebagai pengalaman pribadi, tetapi juga sebagai bagian dari pengalaman anggota kelompok lainnya. Menurut (Van Zomeren et al., 2008) menempatkan identitas sosial sebagai salah satu komponen penting yang menghubungkan pengalaman ketidakadilan dengan kemungkinan munculnya tindakan kolektif. Dengan demikian, semakin kuat seseorang memandang dirinya sebagai bagian dari suatu kelompok, semakin terbuka kemungkinan persoalan yang dialaminya dipahami sebagai persoalan kelompok.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perempuan di Kota Solok telah memiliki pengetahuan mengenai KDRT, tetapi pengetahuan tersebut belum secara konsisten berkembang menjadi kesadaran bahwa KDRT merupakan persoalan yang juga berkaitan dengan perempuan sebagai kelompok. KDRT masih sering dipahami sebagai persoalan rumah tangga masing-masing. Perempuan dapat mengenali adanya perlakuan kasar, bentakan, penghinaan, penelantaran ekonomi, atau kekerasan fisik, tetapi pengalaman tersebut lebih sering ditempatkan dalam hubungan antara suami dan istri. Kondisi ini menyebabkan pengalaman kekerasan belum sepenuhnya dipahami sebagai pengalaman sosial yang dapat dialami oleh perempuan lain.

Kondisi tersebut juga perlu dipahami dalam konteks sosial budaya masyarakat Minangkabau. Hal ini sejalan dengam (Irawaty & Darojat, 2019) menunjukkan bahwa perempuan dalam adat Minangkabau memiliki posisi dan peran yang penting dalam keluarga maupun penyelesaian persoalan masyarakat. Namun, posisi sosial tersebut tidak secara otomatis berarti bahwa setiap persoalan yang dialami perempuan akan dipahami sebagai persoalan bersama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks KDRT masih terdapat kecenderungan untuk membatasi persoalan pada ranah keluarga sehingga pengalaman perempuan sebagai anggota kelompok belum sepenuhnya menjadi dasar pembentukan kesadaran kolektif.

Temuan ini memperlihatkan bahwa pengenalan terhadap KDRT belum dapat disamakan dengan terbentuknya identitas sosial. Perempuan dapat mengetahui bahwa

kekerasan fisik, verbal, dan penelantaran ekonomi merupakan bentuk perlakuan yang merugikan, tetapi ketika pengalaman tersebut hanya dimaknai sebagai masalah antara suami dan istri, dasar untuk membangun kepedulian terhadap pengalaman perempuan lain menjadi terbatas. Oleh karena itu, persoalan kesadaran dalam penelitian ini bukan hanya mengenai apakah perempuan mengetahui bentuk-bentuk KDRT, tetapi juga bagaimana perempuan menghubungkan pengalaman individual dengan pengalaman kelompok.

Temuan tersebut sejalan dengan kerangka SIMCA yang menempatkan identitas sosial sebagai salah satu dasar munculnya pemahaman mengenai persoalan kelompok (Van Zomeren et al., 2008). Begitupula (Setiawan, 2020; Qahar et al., 2025)juga menunjukkan bahwa identitas sosial menjadi bagian penting dalam menjelaskan bagaimana individu mengembangkan persepsi berbasis kelompok dalam konteks Indonesia. Dalam penelitian ini, identitas perempuan sebagai kelompok yang sama-sama berpotensi mengalami KDRT belum sepenuhnya berkembang menjadi dasar tindakan bersama. Dengan demikian, pembentukan kesadaran perempuan terhadap KDRT tidak cukup dilakukan melalui peningkatan pengetahuan mengenai definisi dan bentuk kekerasan. Pengetahuan tersebut perlu dihubungkan dengan pengalaman bersama perempuan melalui ruang interaksi, diskusi, dukungan sosial, dan kegiatan pemberdayaan. Dengan cara tersebut, perempuan tidak hanya memahami bahwa dirinya dapat menjadi korban KDRT, tetapi juga memahami bahwa persoalan tersebut merupakan masalah sosial yang dapat dialami perempuan lain dan membutuhkan dukungan bersama.

2. Persepsi Ketidakadilan dalam Merespons KDRT

Dalam SIMCA, persepsi ketidakadilan berkaitan dengan penilaian individu bahwa dirinya atau kelompoknya mengalami perlakuan yang merugikan dan tidak seharusnya diterima. Persepsi tersebut menjadi penting karena pengetahuan mengenai suatu masalah belum tentu menghasilkan dorongan untuk bertindak apabila individu belum melihat keadaan tersebut sebagai bentuk ketidakadilan. Van Zomeren menunjukkan bahwa perceived injustice merupakan salah satu komponen utama dalam menjelaskan kecenderungan tindakan kolektif (Van Zomeren et al., 2008). Temuan penelitian menunjukkan bahwa persepsi ketidakadilan perempuan terhadap KDRT belum terbentuk secara konsisten. Perempuan dapat menyadari bahwa dirinya dibentak, direndahkan, tidak memperoleh dukungan ekonomi, atau menerima perlakuan kasar, tetapi pada kondisi tertentu tindakan tersebut masih dianggap sebagai hal yang dapat dimaklumi. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara mengenali suatu tindakan

sebagai tidak menyenangkan dan menilai tindakan tersebut sebagai ketidakadilan yang tidak seharusnya diterima.

Perbedaan tersebut terutama terlihat pada pemaknaan kekerasan fisik dan nonfisik. Kekerasan fisik relatif lebih mudah dikenali karena dampaknya dapat dilihat dan dirasakan secara langsung. Sebaliknya, kekerasan verbal seperti bentakan, penghinaan, atau ucapan yang merendahkan masih dapat dianggap sebagai emosi sesaat, candaan, atau bagian dari konflik rumah tangga. Penelantaran ekonomi juga tidak selalu dipahami sebagai KDRT apabila perempuan masih dapat memenuhi kebutuhan dirinya melalui sumber ekonomi lain. Temuan ini memperkuat kajian (Santoso, 2019; Susanti & Fatmariza, 2019) yang menjelaskan bahwa KDRT mencakup kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga, sehingga pemahaman mengenai KDRT tidak seharusnya dibatasi pada kekerasan fisik saja.

Relasi kuasa dalam rumah tangga juga memengaruhi pembentukan persepsi ketidakadilan. Ketika suami dipandang sebagai pihak yang memiliki kewenangan lebih besar dalam keluarga, tindakan memarahi, membentak, atau memberikan teguran keras dapat ditafsirkan sebagai bentuk kepemimpinan atau pendisiplinan. Akibatnya, tindakan yang merugikan perempuan tidak selalu segera dinilai sebagai kekerasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa persepsi ketidakadilan tidak hanya dibentuk oleh tindakan yang terjadi, tetapi juga oleh cara perempuan memberikan makna terhadap tindakan tersebut.

Kondisi ekonomi turut memperlihatkan adanya jarak antara kesadaran dan tindakan. Perempuan yang menyadari bahwa dirinya mengalami perlakuan yang merugikan tetap harus mempertimbangkan kebutuhan anak, keberlangsungan keluarga, tempat tinggal, dan sumber penghasilan. Oleh sebab itu, pengakuan bahwa suatu tindakan merupakan ketidakadilan belum otomatis membuat perempuan mampu mengambil keputusan untuk menolak atau meninggalkan situasi tersebut. Temuan tersebut memiliki hubungan dengan penelitian (Evans & Feder, 2016) yang menunjukkan bahwa proses mencari bantuan bagi perempuan yang mengalami kekerasan dipengaruhi oleh berbagai hambatan dan pertimbangan dalam lingkungan sosial maupun hubungan personal. Jalur pencarian bantuan dapat berlangsung melalui dukungan informal maupun formal, dan keputusan untuk mengungkapkan pengalaman kekerasan tidak selalu berlangsung secara sederhana. Temuan tersebut relevan dengan kondisi perempuan di Kota Solok yang telah mengetahui adanya masalah, tetapi belum selalu mengambil langkah pelaporan atau meminta bantuan.

Selain itu, (Overstreet & Quinn, 2013) menjelaskan bahwa stigma budaya, internalisasi stigma, dan kekhawatiran terhadap stigma yang akan diterima dapat menjadi hambatan dalam pencarian bantuan pada kasus kekerasan pasangan. Dalam penelitian ini, pandangan bahwa KDRT merupakan urusan rumah tangga dan kekhawatiran terhadap konsekuensi pelaporan dapat dipahami sebagai bagian dari lingkungan sosial yang memengaruhi keberanian perempuan untuk merespons kekerasan. Dengan demikian, peningkatan kesadaran tidak cukup berhenti pada kemampuan mengenali bentuk KDRT. Perempuan perlu memperoleh pemahaman bahwa perlakuan yang merendahkan, mengancam, mengontrol, atau menelantarkan dapat menjadi bentuk kekerasan meskipun tidak selalu meninggalkan luka fisik. Pemahaman tersebut penting agar batas antara perlakuan yang dianggap biasa dan perlakuan yang merupakan kekerasan dapat menjadi lebih jelas.

3. KDRT sebagai Persoalan Privat dan Hambatan Pembentukan Kesadaran Bersama

Pandangan bahwa KDRT merupakan urusan rumah tangga menjadi salah satu temuan yang menghubungkan ketiga aspek dalam SIMCA. Ketika KDRT dipandang sebagai persoalan privat, pengalaman korban cenderung tidak ditempatkan sebagai persoalan yang memerlukan respons bersama dari lingkungan sosial. Akibatnya, perempuan lebih mungkin menyelesaikan persoalan sendiri atau melalui lingkup keluarga terdekat. Dalam penelitian ini, pandangan tersebut tidak hanya muncul dari perempuan yang mengalami atau mengetahui KDRT, tetapi juga dari masyarakat sekitar. Sebagian masyarakat memandang bahwa keterlibatan dalam konflik rumah tangga dapat dianggap sebagai campur tangan terhadap urusan keluarga orang lain. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat tidak selalu memberikan respons meskipun mengetahui adanya persoalan dalam rumah tangga.

Jika dikaitkan dengan identitas sosial, pandangan privat tersebut membatasi terbentuknya pemahaman bahwa KDRT merupakan persoalan yang dapat dialami perempuan sebagai kelompok. Jika dikaitkan dengan persepsi ketidakadilan, pandangan privat membuat kekerasan lebih mudah dipahami sebagai konflik personal daripada sebagai perlakuan yang merugikan perempuan. Selanjutnya, kondisi tersebut juga berkaitan dengan efikasi kelompok karena perempuan tidak selalu memperoleh pengalaman bahwa lingkungan sosial dapat memberikan bantuan. Temuan tersebut dapat dikaitkan dengan (Overstreet & Quinn, 2013), yang menjelaskan bahwa stigma sosial dan kekhawatiran terhadap reaksi lingkungan dapat menjadi penghambat pencarian bantuan dalam kasus kekerasan pasangan. Dengan demikian, pandangan bahwa KDRT merupakan persoalan privat tidak hanya berpengaruh terhadap cara

masyarakat melihat kasus tersebut, tetapi juga dapat memengaruhi keputusan perempuan untuk membuka pengalaman kekerasan kepada pihak lain.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya pasif. Beberapa warga memberikan saran kepada korban, mendorong korban untuk melapor apabila kekerasan berulang, dan membantu memisahkan korban dengan pelaku. Hal tersebut menunjukkan adanya potensi dukungan sosial yang dapat dikembangkan. Persoalannya adalah dukungan tersebut belum menjadi pola yang kuat, terstruktur, dan konsisten di antara anggota masyarakat. Kondisi tersebut berbeda dengan temuan (Hatu et al., 2024) mengenai solidaritas kader PKK di Kelurahan Dembe I. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa solidaritas kelompok diperkuat oleh kesadaran kolektif, saling percaya, kesamaan perasaan, kerja sama, gotong royong, dan rasa kebersamaan. Dalam konteks KDRT di Kota Solok, unsur-unsur tersebut belum sepenuhnya terbentuk sebagai jaringan dukungan perempuan dalam menghadapi kekerasan. Artinya, keberadaan kelompok sosial belum otomatis menghasilkan dukungan kolektif terhadap korban KDRT.

DPPPA Kota Solok telah melakukan sosialisasi, membangun jejaring perlindungan, melakukan penjangkauan, menyediakan pendampingan, serta menyebarkan informasi melalui berbagai media. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan informasi dan layanan tersebut belum sepenuhnya mengubah pemaknaan KDRT sebagai persoalan domestik. Temuan ini memperlihatkan bahwa edukasi perlu disertai pembentukan ruang sosial yang memungkinkan perempuan berbagi pengalaman, memperoleh dukungan, dan mengetahui bahwa mencari bantuan bukan berarti membuka aib keluarga. Dengan demikian, tantangan pembentukan kesadaran bersama bukan hanya terletak pada kurangnya informasi, tetapi juga pada norma sosial yang menentukan apakah suatu masalah boleh dibicarakan di ruang publik. Ketika KDRT terus ditempatkan sebagai urusan pribadi, pengetahuan yang telah diberikan melalui sosialisasi berpotensi berhenti pada tingkat pemahaman individual dan belum berkembang menjadi kesadaran kolektif.

4. Efikasi Kelompok dalam Kemampuan Perempuan untuk Bertindak

Efikasi kelompok dalam SIMCA berkaitan dengan keyakinan bahwa kelompok memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan dan mencapai tujuan bersama. Dalam konteks KDRT, efikasi kelompok dapat dilihat dari keyakinan perempuan dan masyarakat bahwa kekerasan dapat dihadapi melalui dukungan keluarga, masyarakat, organisasi perempuan, maupun lembaga perlindungan. Dalam kerangka SIMCA, efikasi bersama

merupakan salah satu komponen yang berhubungan dengan kecenderungan melakukan tindakan kolektif (Van Zomeren et al., 2008).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kemampuan untuk bertindak belum berkembang secara merata. Sebagian perempuan memilih diam dan menunggu keadaan menjadi lebih tenang untuk menghindari konflik yang lebih besar. Sebagian lainnya telah menunjukkan keberanian untuk melawan, berbicara kepada keluarga, atau meminta bantuan. Pada tingkat masyarakat, terdapat pula warga yang memberikan saran, mendorong pelaporan, dan membantu korban ketika terjadi kekerasan.

Perbedaan respons tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai KDRT belum secara otomatis menghasilkan keberanian bertindak. Perempuan juga membutuhkan keyakinan bahwa tindakan yang dilakukan akan memperoleh dukungan dan tidak membuat dirinya menghadapi persoalan seorang diri. Ketika perempuan memandang bahwa KDRT harus diselesaikan secara pribadi, kemungkinan untuk menggunakan dukungan kelompok menjadi lebih terbatas. Ketergantungan ekonomi memperkuat kondisi tersebut. Perempuan yang bergantung secara ekonomi kepada suami dapat menghadapi pertimbangan yang lebih kompleks ketika hendak menolak kekerasan atau meninggalkan hubungan. Keputusan tersebut dapat berkaitan dengan kebutuhan anak, tempat tinggal, pendapatan, dan keberlangsungan keluarga. Dengan demikian, rendahnya tindakan bukan selalu menunjukkan bahwa perempuan tidak mengetahui adanya kekerasan, tetapi dapat menunjukkan adanya keterbatasan sumber daya dan dukungan untuk melakukan perubahan.

Hal tersebut sejalan dengan (Evans & Feder, 2016; Abidin, 2011) yang menunjukkan bahwa pencarian bantuan pada perempuan penyintas kekerasan merupakan proses yang dipengaruhi oleh konteks sosial, hubungan personal, serta ketersediaan jalur bantuan formal dan informal. Oleh karena itu, penguatan efikasi kelompok perlu diarahkan pada terciptanya keyakinan bahwa terdapat pihak yang dapat dipercaya dan dapat memberikan bantuan ketika perempuan memutuskan untuk bertindak. Penelitian (Hatu et al., 2024; Nailul & Arif, 2023) juga memberikan gambaran bahwa solidaritas kelompok dapat berkembang melalui saling percaya, kerja sama, kesamaan perasaan, dan kesadaran kolektif. Dalam konteks KDRT di Kota Solok, unsur tersebut masih membutuhkan penguatan. Perempuan belum sepenuhnya memiliki pengalaman bahwa sesama perempuan atau lingkungan sosial dapat menjadi jaringan perlindungan yang dapat diandalkan.

Oleh karena itu, keberadaan DPPPA Kota Solok dan UPTD PPA memiliki arti penting dalam membangun efikasi kelompok. Sosialisasi, jejaring perlindungan, pendampingan, penjangkauan korban, peningkatan kapasitas masyarakat, dan koordinasi dengan berbagai pihak dapat memberikan pilihan kepada perempuan bahwa KDRT tidak harus dihadapi seorang diri. Dukungan kelembagaan tersebut juga dapat menjadi jembatan antara kesadaran individual dan kemampuan kelompok untuk merespons persoalan. Maka itu efikasi kelompok dalam penelitian ini tidak hanya berkaitan dengan keberanian individu untuk melawan pelaku. Efikasi kelompok juga berkaitan dengan keyakinan bahwa terdapat lingkungan sosial dan kelembagaan yang mampu memberikan dukungan. Apabila keyakinan tersebut semakin kuat, perempuan memiliki lebih banyak pilihan untuk berbicara, meminta bantuan, menggunakan layanan perlindungan, dan mengambil tindakan yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

5. Keterkaitan Ketiga Aspek SIMCA dalam Kesadaran Perempuan terhadap KDRT

Jika ketiga aspek SIMCA dilihat secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan adanya keterkaitan antara cara perempuan melihat dirinya sebagai bagian dari kelompok, cara perempuan menilai perlakuan yang dialami, dan keyakinan untuk bertindak. Ketiganya tidak berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan dalam proses pembentukan kesadaran terhadap KDRT. Identitas sosial yang belum kuat membuat KDRT lebih sering dipahami sebagai persoalan pribadi. Kondisi tersebut kemudian berkaitan dengan persepsi ketidakadilan yang belum konsisten karena tidak semua bentuk kekerasan dipahami sebagai perlakuan yang tidak dapat dibenarkan. Ketika KDRT tidak dipandang sebagai persoalan bersama dan batas ketidakadilan belum tegas, dukungan kelompok juga menjadi terbatas. Akibatnya, perempuan belum sepenuhnya memiliki keyakinan bahwa KDRT dapat dihadapi dengan dukungan lingkungan sosial.

Hubungan tersebut sesuai dengan kerangka SIMCA yang menjelaskan bahwa identitas sosial, persepsi ketidakadilan, dan efikasi memiliki kontribusi yang saling berkaitan terhadap tindakan kolektif (Van Zomeren et al., 2008). Setiawan juga menunjukkan bahwa ketiga konsep tersebut dapat digunakan dalam konteks Indonesia untuk menjelaskan bagaimana identitas kelompok berkaitan dengan persepsi ketidakadilan dan keyakinan mengenai kemampuan kelompok (Setiawan, 2020). Dalam penelitian ini, SIMCA membantu menunjukkan bahwa lemahnya tindakan kolektif tidak semata-mata disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, tetapi juga berkaitan dengan cara perempuan memaknai dirinya sebagai kelompok dan memandang kemampuan lingkungan sosial dalam memberikan

dukungan. Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa kesadaran perempuan terhadap KDRT bukan hanya persoalan mengetahui definisi KDRT. Kesadaran yang lebih kuat membutuhkan proses yang menghubungkan pengetahuan, pengenalan terhadap ketidakadilan, rasa memiliki terhadap kelompok, dan keyakinan bahwa tindakan dapat dilakukan dengan dukungan pihak lain (Bhakti et al., 2025; Precillia et al., 2022; Septirahmah & Hilmawan, 2021). Dengan demikian, peningkatan kesadaran perlu dipahami sebagai proses sosial, bukan sekadar proses pemberian informasi.

Dalam konteks Kota Solok, proses tersebut telah didukung oleh keberadaan DPPPA dan UPTD PPA melalui kegiatan sosialisasi, perlindungan, pendampingan, penjangkauan, serta koordinasi dengan berbagai unsur masyarakat. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan program belum sepenuhnya menghilangkan hambatan sosial dan kultural yang membuat KDRT tetap dipandang sebagai urusan pribadi. Oleh karena itu, penguatan kesadaran perlu bergerak dari penyampaian informasi menuju pembentukan lingkungan sosial yang memperkuat kepercayaan, solidaritas, dukungan, dan keberanian menggunakan layanan yang tersedia.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran perempuan terhadap KDRT di Kota Solok berada dalam proses perkembangan. Perempuan telah mampu mengenali sebagian bentuk KDRT dan mengetahui keberadaan lembaga perlindungan, tetapi pemahaman mengenai kekerasan nonfisik, persepsi ketidakadilan, keberanian mencari bantuan, serta keyakinan terhadap dukungan kelompok masih belum merata. Dengan menggunakan SIMCA, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai proses pembentukan kesadaran yang masih berlangsung pada tiga aspek utama, yaitu identitas sosial, persepsi ketidakadilan, dan efikasi kelompok.

Implikasi penelitian ini secara teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian memperlihatkan bahwa SIMCA dapat digunakan untuk memahami kesadaran perempuan terhadap KDRT bukan hanya dari sisi pengetahuan, tetapi dari keterkaitan antara identitas sosial, persepsi ketidakadilan, dan efikasi kelompok. Secara praktis, hasil penelitian menunjukkan bahwa DPPPA, UPTD PPA, organisasi perempuan, dan masyarakat perlu memperkuat sosialisasi yang tidak hanya menjelaskan bentuk KDRT, tetapi juga membangun ruang aman untuk berbagi pengalaman, memperkuat solidaritas, memberikan informasi mengenai jalur bantuan, dan meningkatkan kepercayaan perempuan terhadap layanan perlindungan. Bagi masyarakat, dukungan terhadap korban perlu diarahkan pada

pendampingan dan perlindungan, bukan menyalahkan korban atau menganggap KDRT semata-mata sebagai urusan privat. Dengan demikian, pemberdayaan perempuan dalam konteks KDRT perlu mencakup peningkatan pengetahuan sekaligus penguatan dukungan sosial dan kelembagaan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada perempuan dan fenomena KDRT di Kota Solok sehingga temuan menggambarkan konteks sosial dan pengalaman informan dalam wilayah penelitian tersebut dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan secara statistik kepada seluruh perempuan. Pengumpulan data melalui wawancara juga memiliki keterbatasan karena KDRT merupakan persoalan sensitif sehingga keterbukaan informan dapat berbeda-beda. Meskipun penelitian menggunakan triangulasi sumber, pengalaman dan pemaknaan antar-informan tetap beragam sehingga kesadaran terhadap KDRT tidak dapat dianggap seragam. Selain itu, penelitian difokuskan pada tiga aspek SIMCA, yaitu identitas sosial, persepsi ketidakadilan, dan efikasi kelompok, sehingga faktor lain seperti kondisi ekonomi, relasi kuasa, dukungan sosial, dan tingkat kepercayaan terhadap lembaga belum dianalisis sebagai variabel atau fokus tersendiri. Penelitian selanjutnya dapat memperluas wilayah dan karakteristik informan serta mengkaji lebih mendalam hubungan antara faktor ekonomi, dukungan sosial, kepercayaan terhadap lembaga, dan pembentukan kesadaran kolektif perempuan dalam merespons KDRT.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran perempuan di Kota Solok dalam merespons kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah terbentuk, tetapi belum berkembang secara optimal jika dilihat melalui tiga aspek Model SIMCA, yaitu identitas sosial, persepsi ketidakadilan, dan efikasi kelompok. Pada aspek identitas sosial, KDRT masih cenderung dipandang sebagai persoalan pribadi dalam rumah tangga sehingga belum sepenuhnya dipahami sebagai persoalan bersama yang dapat dialami oleh perempuan secara kolektif. Pada aspek persepsi ketidakadilan, terdapat perbedaan dalam mengenali dan menilai bentuk-bentuk KDRT, karena kekerasan fisik relatif lebih mudah dianggap sebagai tindakan yang salah, sementara kekerasan verbal dan penelantaran ekonomi masih dapat dinormalisasi atau dibenarkan berdasarkan kondisi tertentu. Sementara itu, pada aspek efikasi kelompok, keyakinan perempuan untuk menghadapi dan merespons KDRT secara bersama masih terbatas karena dipengaruhi oleh ketergantungan ekonomi, kuatnya pandangan bahwa KDRT

merupakan urusan privat, serta belum optimalnya dukungan sosial. Dengan demikian, kesadaran perempuan terhadap KDRT tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mengenali tindakan kekerasan, tetapi juga oleh kemampuan membangun pemahaman bersama mengenai ketidakadilan dan keyakinan bahwa perempuan dapat memperoleh dukungan serta menghadapi persoalan tersebut secara kolektif.

Kontribusi penelitian ini memberikan secara empiris dan konseptual dalam memahami pembentukan kesadaran perempuan terhadap KDRT dengan menempatkan persoalan tersebut tidak semata-mata pada tingkat pengetahuan individual, tetapi juga pada proses terbentuknya kesadaran kelompok. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa sosialisasi mengenai bentuk dan dampak KDRT saja belum cukup untuk mendorong respons yang kuat apabila perempuan masih memandang KDRT sebagai persoalan privat, belum memiliki penilaian yang konsisten terhadap berbagai bentuk kekerasan, dan belum memiliki keyakinan terhadap kekuatan dukungan kelompok. Oleh karena itu, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai pemberdayaan perempuan dengan menekankan pentingnya membangun rasa kebersamaan, meningkatkan kemampuan mengenali berbagai bentuk ketidakadilan, serta memperkuat jejaring dukungan sosial agar perempuan memiliki ruang yang lebih aman untuk berbagi pengalaman, mencari bantuan, dan merespons KDRT secara bersama.

Rekomendasi penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas jumlah dan karakteristik informan serta wilayah penelitian agar diperoleh gambaran yang lebih beragam mengenai pembentukan kesadaran perempuan terhadap KDRT dalam konteks sosial yang berbeda. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji secara lebih mendalam keterkaitan antara ketergantungan ekonomi, relasi kuasa dalam rumah tangga, dukungan keluarga dan komunitas, akses terhadap layanan perlindungan, serta keberanian perempuan dalam mencari bantuan dan melakukan tindakan kolektif. Selain pendekatan kualitatif, penelitian berikutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran untuk mengukur hubungan antara identitas sosial, persepsi ketidakadilan, efikasi kelompok, dan kecenderungan perempuan dalam merespons KDRT. Dengan demikian, penelitian mendatang dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif sekaligus menjadi dasar bagi pengembangan program edukasi, pemberdayaan, dan dukungan sosial yang lebih sesuai dengan kebutuhan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, M. J. (2011). *Narir shotru-mitru* [Musuh dan Sahabat Perempuan]. Maktabatul Azhar.

Afifah, N. (2024). Mengkaji Ulang Stereotip Gender: Eksplorasi Stereotip Gender dalam Konteks Budaya Matrilineal Minangkabau. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 26*(1), 93–104. https://doi.org/10.26623/jdsb.v26i1.9779

Bhakti, C. P., & Azfin, T. A. (2025). Pengembangan Buku Panduan Kelompok Psikoedukasi Teknik Permainan untuk Mengembangkan Social Awareness Siswa SMP. *Jurnal Pembelajaran, Bimbingan, dan Pengelolaan Pendidikan, 5*(3), Article 7. https://doi.org/10.17977/um065.v5.i3.2025.7

Evans, M. A., & Feder, G. S. (2016). Help-seeking amongst women survivors of domestic violence: A qualitative study of pathways towards formal and informal support. *Health Expectations, 19*(1), 62–73. https://doi.org/10.1111/hex.12330

Hairani, D. R. (2023). Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Beragama pada Anak Usia Dini di TK Yomako Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura Papua. *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan, 1*(1), 132–139. https://doi.org/10.59031/jkppk.v1i1.80

Hatu, D. R. R., Tanipu, F., Tamu, Y., & Mole, M. T. F. D. (2024). Solidaritas Kader PKK dalam Melaksanakan Program Kerja di Kelurahan Dembe I Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo. *Sosiologi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 1*(3), 185–196. https://doi.org/10.37905/sjppm.v1i3.82

'Ilmiyyati, N. M., & Nur'aeni, E. (2023). Pengaruh Layanan Informasi dalam Meningkatkan Kesadaran Ibu Pengajian Majlis Ta'lim Dawamatul Mukhlishoh tentang Pembentukan Akhlak Islami. *Jurnal Al-Taujih: Bingkai Bimbingan dan Konseling Islami, 9*(2), 131–136. https://doi.org/10.15548/atj.v9i2.7064

Irawaty, & Darojat, Z. (2019). Kedudukan dan Peran Perempuan dalam Perspektif Islam dan Adat Minangkabau. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, 3*(1), 59–76. https://doi.org/10.21009/hayula.003.1.04

Isti'anah, S. N., & Arif, L. (2023). Efektivitas Program KALIMASADA dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Administrasi Kependudukan di Kelurahan Kendangsari. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 9*(2), 171–178. https://doi.org/10.25299/jiap.2023.13532

Ksanjaya, R., & Rahayu, E. T. (2022). Motivasi Siswa dalam Kegiatan Ekstrakurikuler Futsal di SMA Negeri 1 Blanakan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), 4*(5), 6094–6099. https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.7660

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2022). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.

Overstreet, N. M., & Quinn, D. M. (2013). The intimate partner violence stigmatization model and barriers to help-seeking. *Basic and Applied Social Psychology, 35*(1), 109–122. https://doi.org/10.1080/01973533.2012.746599

Precillia, M., & Darmadi, D. (2022). Women's study on Randai Si Rabuang Ameh, as an existence of Randai development in Minangkabau. *Ekspresi Seni: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Karya Seni, 24*(2), 207–228. https://journal.isi-padangpanjang.ac.id/index.php/Ekspresi/article/view/2256

Qahar, J. A., Hillaluddin, A. H., & Ahmad Ramli, F. Z. (2025). Child marriage and domestic violence among Syrian refugee girls in Domiz Camp Kurdistan-Iraq. *Journal of Human Rights and Social Work, 10*(1), 68–78. https://doi.org/10.1007/s41134-024-00340-0

Santoso, A. B. (2019). Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *KOMUNITAS: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 10*(1), 35–47. https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072

Septirahmah, A. P., & Hilmawan, M. R. (2021). Faktor-Faktor Internal yang Mempengaruhi Kedisiplinan: Pembawaan, Kesadaran, Minat dan Motivasi, serta Pola Pikir. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, 2*(2), 618–622. https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i2.602

Setiawan, T., Scheepers, P., & Sterkens, C. (2020). Applicability of the social identity model of collective action in predicting support for interreligious violence in Indonesia. *Asian Journal of Social Psychology, 23*(3), 278–292. https://doi.org/10.1111/ajsp.12397

Susanti, L., & Fatmariza, F. (2019). Layanan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan di Women's Crisis Center Nurani Perempuan Kota Padang. *Journal of Civic Education, 2*(4), 244–250. https://doi.org/10.24036/jce.v2i4.228

Van Zomeren, M., Postmes, T., & Spears, R. (2008). Toward an integrative social identity model of collective action: A quantitative research synthesis of three socio-psychological perspectives. *Psychological Bulletin, 134*(4), 504–535. https://doi.org/10.1037/0033-2909.134.4.504